

## **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN BELANJA DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN (STUDI KASUS 35 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2016)**

Nur Ika Fitriyanti<sup>1✉</sup>, Herniwati Retno Handayani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

✉Email: nurikafitri902@gmail.com

### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze the influence of Local Revenue (PAD), Special Allocation Fund (DAK), and Region Expenditure to Poverty Rate at Regency/City in the Province Central Java Year 2012-2016. This study use secondary data. The method used to analyze is pooled data regression. Pooled data is a combination of cross section data that includes 35 Regency/Cities of Central Java and time series data from 2012 until 2016. The result showed that Fixed Effect Model (FEM) is the most appropriate. Based on regression result of this study shows that Local Revenue (PAD) and Special Allocation Fund (DAK) have negative significant effect to decrease of Poverty Rate. While Region Expenditure has a negative and not significant effect on the Poverty Rate. Simultaneously, Local Revenue (PAD), Special Allocation Fund (DAK), and Region Expenditure have significant effect to Poverty Rate.*

**Keywords:** *Poverty Rate, Pooled Data, Fixed Effect Model (FEM)*

### **PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Kesejahteraan Umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan. Terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan. Semakin rendah tingkat kemiskinan menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk. Provinsi Jawa Tengah sebagai lingkup daerah yang akan diteliti merupakan salah satu daerah dengan jumlah presentase penduduk miskin terbesar dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Berdasarkan data BPS, Jawa Tengah mempunyai presentase penduduk miskin sebesar 13,58% pada tahun 2015.

Beberapa upaya pemerintah telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan menurunkan angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah dengan meletakkan dasar otonomi daerah yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada penerapan otonomi daerah terjadi pergeseran wewenang dan tanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Diterapkannya otonomi daerah, membawa

konsekuensi akan adanya pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan pusat ke daerah yang mencakup penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (otonomi daerah)(Wayan,2014). Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangan sesuai dengan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD),lain-lain PAD yang sah, serta Dana Transfer dari pemerintah pusat yang dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Secara teoritis, pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber pembiayaan yang utama dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota mestinya berasal dari kemandirian daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun menurut Kuncoro (2004), dalam realisasinya menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Sejalan dengan hal tersebut, membawa implikasi adanya transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal. Kemampuan PAD dalam membiayai Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut

**Tabel 1**

**Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 (persen)**

<b>Kab/Kota</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kab.Banjarnegara	8.48	8.42	11.98	11.20	10.97
Kab.Banyumas	13.98	15.28	19.06	19.84	18.65
Kab.Batang	9.41	13.44	14.24	13.14	13.45
Kab.Blora	7.29	7.22	9.86	9.37	8.78
Kab.Boyolali	10.06	11.31	14.06	14.22	14.21
Kab.Brebes	7.07	8.06	13.61	12.62	11.51
Kab.Cilacap	10.97	13.60	16.96	15.42	13.60
Kab.Demak	8.72	10.33	14.12	14.20	13.92
Kab.Grobogan	8.76	9.52	14.30	13.78	14.37
Kab.Jepara	9.95	9.90	15.39	14.56	14.94
Kab.Karanganyar	9.95	12.56	13.38	14.38	14.44
Kab.Kebumen	7.25	8.49	12.70	10.73	10.75
Kab.Kendal	10.32	10.71	15.22	14.15	13.61
Kab.Klaten	5.89	7.12	9.44	9.17	9.82
Kab.Kudus	10.50	12.55	15.52	14.96	12.99
Kab.Magelang	10.79	13.77	14.65	14.99	13.91
<b>Lanjutan Tabel 1</b>					
Kab.Pati	11.48	10.23	14.99	14.51	12.19

Kab.Pekalongan	10.96	11.65	18.27	15.66	17.21
Kab.Pemalang	8.19	9.23	13.45	11.77	14.91
Kab.Purbalingga	9.57	10.91	15.93	14.71	13.89
Kab.Purworejo	8.73	10.59	13.85	13.11	12.99
Kab.Rembang	10.66	11.96	12.97	15.94	13.50
Kab.Semarang	12.84	16.17	16.49	16.70	16.14
Kab.Sragen	10.66	10.42	14.99	13.16	14.05
Kab.Sukoharjo	13.78	15.06	17.35	19.20	19.32
Kab.Tegal	8.81	10.20	14.80	15.72	13.05
Kab.Temanggung	8.21	10.20	21.67	14.12	16.17
Kab.Wonogiri	7.55	7.70	11.02	11.25	10.25
Kab.Wonosobo	8.35	11.00	14.37	12.22	13.42
Kota Magelang	17.02	17.08	24.18	25.34	25.27
Kota Pekalongan	16.24	17.20	19.55	19.18	20.54
Kota Salatiga	14.10	20.05	25.67	24.78	22.16
Kota Semarang	37.97	37.43	38.50	37.54	37.94
Kota Surakarta	20.23	21.70	22.68	24.33	25.32
Kota Tegal	26.70	26.21	20.90	28.31	26.74
RATA-RATA	11.76	13.06	16.46	16.12	15.86

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kemampuan PAD untuk membiayai Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah masih rendah yaitu rata-rata pada tahun 2012 sebesar 11,76 persen, tahun 2013 sebesar 13,06 persen, tahun 2014 sebesar 16,46 persen, tahun 2015 sebesar 16,12 persen dan pada tahun 2016 sebesar 15,86 persen. Hal ini menandakan bahwa masih rendahnya PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam membiayai Belanja Daerah, yang berarti kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah masih rendah. Kemandirian daerah yang rendah berimplikasi pada masih tinggi ketergantungan daerah terhadap pusat dalam bentuk dana transfer (DAU, DAK, dan DBH).

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan sendiri terdiri dalam Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam pelaksanaan desentralisasi, peran dana transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dalam hal pembiayaan. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah luas nyata dan bertanggungjawab, pemerintah daerah dituntut mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri dalam rangka membiayai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan. Hal ini menandakan bahwa daerah harus berusaha untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik meningkatkan penerimaan sumber-sumber PAD yang ada maupun penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, karena PAD merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah

kepada pusat. Pada umumnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung kepada pemerintah pusat, (Suparmoko, 2011). Hakikat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah daerah adalah harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, sehingga setiap belanja dalam program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD harus bertumpu pada hal tersebut. Belanja Daerah merupakan bagian utama dalam APBD yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.

## **TINAJUAN PUSTAKA**

### **Pembangunan Ekonomi**

Masalah pembangunan harus ditegaskan bahwa pembangunan suatu negara harus mampu mengatasi tiga persoalan mendasar yaitu masalah kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang mencerminkan perubahan struktur masyarakat secara keseluruhan baik itu struktur nasional, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional. Perubahan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan memberantas kemiskinan sehingga diharapkan terwujudnya kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual (Todaro,2000:21).

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi dan non ekonomi. Oleh karena itu sasaran pembangunan yang minimal dan pasti ada menurut Todaro (2000) adalah:

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
2. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu atau nasional.
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan tidak hanya hubungan dengan orang lain dan Negara lain tetapi dari sumber- sumber kebodohan dan penderitaan.

### **Kemiskinan**

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai individu yang mempunyai rata-rata pengeluaran per bulan kurang dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah penjumlahan antara garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan. Garis kemiskinan makanan adalah garis kemiskinan yang

mengacu pada pengeluaran individu dalam memenuhi kebutuhan minimum makanannya sebanyak 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan nonmakanan mengacu pada pengeluaran individu dalam memenuhi kebutuhan minimum nonmakanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Menurut BPS, kemiskinan pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi, yaitu:

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang terbatas pada kebutuhan pokok sehingga orang tersebut dapat disebut hidup dengan layak. Kemiskinan absolut diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya tersebut dengan tujuan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin absolut apabila pendapatan yang diperolehnya kurang dari garis kemiskinan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya.

World bank menggunakan ukuran kemiskinan absolut ini untuk menentukan jumlah penduduk miskin. Menurut world bank, penduduk miskin adalah mereka yang hidup kurang dari US\$1 per hari dalam dolar PPP (*Purchasing Power Parity*). Akan tetapi, tidak semua negara mengikuti standar minimum yang digunakan world bank tersebut, karena bagi negara-negara berkembang level tersebut masihlah tinggi, oleh karena itu banyak negara menentukan garis kemiskinan nasional sendiri dimana kriteria yang digunakan disesuaikan dengan kondisi perekonomian masing-masing negara.

Di Indonesia, BPS menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin (*head count index*) yaitu penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan berdasarkan data hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Garis kemiskinan yang merupakan dasar penghitungan jumlah penduduk miskin dihitung dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yaitu besarnya rupiah yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan atau lebih dikenal dengan garis kemiskinan makanan dan non makanan

Garis kemiskinan makanan yang dimaksud adalah pengeluaran konsumsi per kapita per bulan yang setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang atau jasa lainnya.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif dilihat dari aspek ketimpangan sosial. Apabila seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, namun masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut termasuk kategori miskin relatif. Semakin tinggi kesenjangan tingkat pendapatan antara golongan atas dengan golongan bawah maka akan semakin tinggi pula jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, kemiskinan relatif berhubungan erat dengan distribusi pendapatan.

## METODE PENELITIAN

### Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan. Sedangkan variabel independen meliputi Pendapatan Asli Daerah (Rasio PAD terhadap Belanja Daerah), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Daerah.

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi APBD dan Persentase penduduk miskin pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. Data realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)) untuk mengetahui jumlah rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah, dana alokasi khusus, serta belanja daerah. Sedangkan data Persentase penduduk miskin diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik Jawa Tengah yaitu ([www.bpsjateng.go.id](http://www.bpsjateng.go.id)).

### Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang diolah menggunakan *Eviews 9*. Data panel atau *pooled data* merupakan kombinasi dari data *cross-section* dan *time series*. Penelitian ini menggunakan data *time series* dengan periode tahun 2012-2016 dengan data *cross section* 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Persamaan dalam model penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{LnKEMISKINAN}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LnRPAD} + \beta_2 \text{LnDAK} + \beta_3 \text{LnBELANJA} + \mu_{it}$$

Keterangan :

$\alpha$	= Konstanta
$\beta$	= Slope atau koefisien regresi
LnKEMISKINAN	= Logaritma natural dari tingkat kemiskinan
LnRPAD	= Logaritma natural dari rasio PAD terhadap Belanja
LnDAK	= Logaritma natural dari dana alokasi khusus
LnBELANJA	= Logaritma natural dari belanja daerah
$\mu$	= <i>error</i>
$i$	= 1,2,3...35 ( <i>cross section</i> Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)
$t$	= 1,2,3,4,5 ( <i>time series</i> tahun 2012-2016)

### Pengujian Hipotesis

#### -Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan atau uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk menganalisis menggunakan uji F harus dilihat nilai t hitung dan t tabel dari penelitian tersebut guna menentukan apakah berada pada daerah terima  $H_0$  dan tolak  $H_1$  atau sebaliknya. Ketentuan-ketentuan dalam pengujian menggunakan uji F yaitu :

- $H_0$  diterima jika  $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$  maka,  $H_1$  ditolak artinya seluruh variabel independen bukan merupakan penjelas terhadap variabel dependen.
- $H_0$  ditolak jika  $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$  maka,  $H_1$  diterima artinya seluruh variabel independen merupakan penjelas terhadap variabel dependen.

#### -Uji Signifikansi Individu ( Uji t)

Uji t merupakan sebuah gambaran hubungan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara individual. Pengujian dengan

menggunakan uji t dilakukan dengan cara membandingkan nilai antara t hitung dan t tabel. Ketentuan-ketentuan dalam pengujian menggunakan uji t yaitu:

- a.  $H_0$  diterima jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  maka  $H_1$  ditolak artinya suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b.  $H_0$  ditolak jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  maka  $H_1$  diterima artinya suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

#### **-Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi atau  $R^2$  untuk menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen yang dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi antara 0 – 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati angka 0 menunjukkan bahwa variabel independen kurang dapat menjelaskan atau mengestimasi variabel dependen. Sementara itu, nilai koefisien determinasi yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan dan mengestimasi variabel dependennya. Namun, koefisien determinasi memiliki kekurangan, yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali dan Ratmono, 2013).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2016 tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari Luas Pulau Jawa dan 1,70 persen dari luas Indonesia. Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 35 Kabupaten/Kota, 29 merupakan kabupaten dan 6 merupakan kota, dengan pusat pemerintahan di Kota Semarang.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sampai tahun 2016 cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2016, persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,27 %. Kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2016 adalah Kabupaten Wonosobo sebesar 20,53%, sedangkan Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Kabupaten Kudus sebesar 7,65%. Kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Kota Surakarta sebesar 10,88%, sedangkan Kota Semarang mempunyai persentase penduduk miskin terendah sebesar 4,85%.

Rasio PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2016, Kabupaten dengan rasio PAD terhadap Belanja terendah adalah Kabupaten Blora sebesar 8,78%, sedangkan Kabupaten dengan rasio PAD terhadap Belanja tertinggi adalah Kabupaten Sukoharjo sebesar 19,32%. Kota dengan rasio PAD terhadap Belanja terendah adalah Kota Pekalongan sebesar 20,54%, sedangkan Kota Semarang mempunyai rasio PAD terhadap Belanja tertinggi sebesar 37,94%.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012-2016 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, Kabupaten dengan realisasi penerimaan DAK terendah adalah Kabupaten Magelang sebesar 83.510 juta rupiah, sedangkan Kabupaten dengan realisasi penerimaan DAK tertinggi adalah Kabupaten Cilacap sebesar 483.813 juta rupiah. Kota dengan realisasi penerimaan DAK terendah adalah Kota Salatiga sebesar 83.698 juta rupiah, sedangkan Kota Semarang mempunyai realisasi penerimaan DAK tertinggi sebesar 246.887 juta rupiah.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2016, Kabupaten dengan realisasi belanja daerah terendah adalah Kabupaten Wonosobo sebesar 1.489.223 juta rupiah, sedangkan Kabupaten dengan realisasi belanja daerah tertinggi adalah Kabupaten Cilacap sebesar 3.150.326 juta rupiah. Kota dengan realisasi belanja daerah terendah adalah Kota Pekalongan sebesar 869.324 juta rupiah, sedangkan Kota Semarang mempunyai realisasi belanja daerah tertinggi sebesar 3.931.803 juta rupiah.

**Hasil Uji Statistik Analisis Regresi**

Berikut adalah hasil perhitungan dan analisis data pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan analisis regresi data panel dengan *Fixed Effect Model (FEM)*:

**Tabel 2**  
**Hasil Estimasi Data Menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)***

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
Konstanta	3.326359	0.330969	10.05036	0.0000
LNRPAD	-0.183349	0.055583	-3.298663	0.0012
LNDAK	-0.017707	0.013089	-1.352826	0.0083
LNBELANJA	-0.051460	0.050480	-1.019410	0.3098
R-square	0.842099			
Adjusted R-square	0.799454			
S.E. of regression	0.191996			
F-Statistic	19.74678			
Prob (F-statistic)	0.000000			
Durbin-Watson	3.145093			

Sumber : *E- Views 9*

Berdasarkan hasil regresi diperoleh persamaan sebagai berikut.

$$\text{LnKemiskinan} = 3.326359 - 0.183349 \cdot \text{LnRPAD} - 0.017707 \cdot \text{LnDAK} - 0.051460 \cdot \text{LnBELANJA}$$

\*Signifikan pada  $\alpha = 5\%$

**-Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Dalam penelitian ini, nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebesar 0.842099 sedangkan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.799454. Nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.799454 menunjukkan bahwa variabel dependen tingkat kemiskinan dapat dijelaskan variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (Rasio PAD terhadap Belanja Daerah), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah sebesar 79,95%. Sedangkan sisanya sebesar 20,05% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model regresi tersebut.

**-Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Berdasarkan hasil estimasi diperoleh nilai pada probabilitas F-statistik sebesar 0.0000 lebih kecil daripada tingkat signifikansi nilai  $\alpha$  (0.05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah



(Rasio PAD terhadap Belanja), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan.

#### -Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Tabel 3

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Variabel Independen	Uji t	Koefisien	Keterangan
LNRPAD	0.0012 < 0.05 (probabilitas < $\alpha$ = 5%)	-0.183349	Berpengaruh signifikan negatif
LNDK	0.0083 < 0.05 (probabilitas < $\alpha$ = 5%)	-0.117707	Berpengaruh signifikan negatif
LNBELANJA	0.3098 < 0.05 (probabilitas < $\alpha$ = 5%)	-0.051460	Berpengaruh tidak signifikan

#### Interpretasi Hasil

##### -Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Pendapatan Asli Daerah (Rasio PAD terhadap Belanja Daerah) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan nilai signifikansi sebesar 0,0012 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) dengan nilai koefisien sebesar -0,1833. Artinya, apabila terjadi peningkatan rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,1833 persen. Hal ini berarti bahwa kemandirian suatu daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dibutuhkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan

Secara teoritis, pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat menanggulangi kemiskinan di daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Riry, M.Rasuli, dan Taufeni Taufik (2017), yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya dapat menanggulangi kemiskinan di daerah.

##### - Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0083 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05). dengan nilai koefisien sebesar -0,1177. Artinya, apabila terjadi peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,1133 persen. Hal ini berarti bahwa, masih rendahnya kemampuan daerah, sehingga menyebabkan pemerintah Kabupaten/Kota

di Provinsi Jawa Tengah masih bergantung pada pemerintah pusat untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dipergunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Tujuan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah otonom yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Sehingga, semakin tinggi Dana Alokasi Khusus (DAK) maka bantuan pemerintah dalam pemberian layanan kepada masyarakat akan meningkat sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Santosa, Budi (2013) dengan hasil yang menunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan.

### **-Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Variabel Belanja Daerah berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,3098 lebih besar dari  $\alpha$  (0,05). Hal itu, dikarenakan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam mengalokasikan Belanja Modal masih relatif sedikit dibandingkan dengan alokasi untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Modal yang besar diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat serta memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan. Alokasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 3 berikut ini :

**Tabel 3**  
**Alokasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016**

Tahun	Belanja Pegawai (jutaan rupiah)	Belanja Barang & Jasa (jutaan rupiah)	Belanja Modal (jutaan rupiah)
2012	1.559.635	1.977.523	611.274
2013	1.741.665	2.143.192	994.741
2014	2.197.436	2.397.686	1.570.679
2015	2.480.896	2.615.823	2.514.682
2016	2.567.876	2.493.432	2.815.678

Sumber : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andyka (2015) dan Riko (2018) yang menyimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah (Rasio PAD terhadap Belanja Daerah) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa, masih rendahnya kemampuan daerah, sehingga menyebabkan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah masih bergantung pada pemerintah pusat untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
3. Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah karena pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mengalokasikan Belanja Modal masih relatif sedikit dibandingkan alokasi untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.
4. Secara simultan variabel PAD (Rasio PAD terhadap Belanja Daerah), DAK, dan Belanja Daerah Berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andyka, Arief .P. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2017). *Persentase Penduduk Miskin 2012-2016*. Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2016. *Data Realisasi APBD Berbagai Tahun Terbitan*, diakses dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Ghozali, Imam & Ratmono, D. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Riko Tri Fasholla. 2018. *Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2016*. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
- Riry Isramiwarti, M. Rasuli, & Taufeni Taufik. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 s.d 2015." *Pekbis Jurnal*, Vol. 9, No.3, 195-213.

Santosa, Budi. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dan Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis* Vol. 5, No. 2 hal 130-143.

Suparmoko, 2011. *Keuangan Negara, Edisi Keenam*. Yogyakarta:BPFE.

Supranto, J. 1997. *Statistik Teori & Aplikasi*. Jakarta:Erlangga.

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Wayan, Suwendra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012. *e- Journal Bisma*. Vol. 2 (3): 144-157